

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.¹

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada

¹Eli Supianto, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, hal 2-3

mereka yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.² Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai "*Victimless crime*" dan "*crime*

²Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hal 37.

without victim” (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.³

Sehubungan dengan *eigenrichting*, menurut Mardjono Reksodiputro permasalahan yang dihadapi paling tidak ada 2 (dua), yaitu:

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*), dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan bukti.⁴

Dilihat dari sisi hukum para pelaku tindak pidana *eigenrichting* yang biasanya melakukan tindakan berupa penganiayaan, pengrusakan, perampasan bahkan pembunuhan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dapat dikenai ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusak barang, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, salah satunya Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Yang bersalah diancam:*
 1. *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

³Zul Akrial, 1998, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Semarang: Universitas Diponegoro. hal. 32.

⁴Mardjono Reksodipuro, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 42.

2. *Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
3. *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Jika di perhatikan lagi, pelaku *eigenrichting* tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***EIGENRICHTING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Studi Kasus di Polres Klaten).***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁵Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 1.

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana baik yang dilakukan sendiri atau bersama?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana baik yang dilakukan sendiri atau bersama.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil bagi penulis, aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi aparat penegak hukum terkait dengan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Usaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum adalah hal yang penting dalam upaya meminimalkan terjadinya *eigenrichting*. Sebagai perbuatan negatif kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi, reaksi ini bisa berupa reaksi formal dan informal. Reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggaran menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat.⁶

Biasanya dengan suatu tindak pidana seorang oknum menderita kerugian. Ada kalanya si korban berusaha sendiri untuk meniadakan kerugian yang ia derita, dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri (*eigenrichting*).⁷

Masyarakat yang menghakimi sendiri pelaku tindak pidana membuat si pelaku selain menjadi pelaku juga sebagai korban tindak pidana. Menurut Mendelsohn, jenis-jenis korban dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:

⁶Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hal. 13.

⁷Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco, hal. 3.

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
3. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
4. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
5. Korban yang salah sendiri, dan
6. Korban karena imajinasinya sendiri.⁸

Perbuatan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan meskipun korban *eigenrichting* adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 33 ayat (1) serta ketentuan 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya *eigenrichting* perlu dilakukan dengan tujuan agar menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya, agar nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum dapat tercapai dan masyarakat dapat ikut berperan dalam mencapai tujuan tersebut.

Diharapkan dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dan tepat dapat meminimalisir terjadinya perbuatan *eigenrichting* kepada pelaku tindak pidana oleh masyarakat agar memberikan efek jera dan kesadaran hukum yang baik untuk masyarakat secara umum.

⁸Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 34.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapat jawaban atas pokok permasalahan.⁹ Maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejalalainya.¹⁰ Penulis akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dan implementasinya di wilayah Polres Klaten.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan seteliti mungkin secara sistematis tentang *eigenrichting* (main hakim sendiri) khususnya di Polres Klaten.

⁹Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal. 2.

¹⁰Amiruddin&ZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Mataram: DivisiBukuPerguruanTinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

¹¹Soerjono Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Klaten, karena dilokasi tersebut memungkinkan untuk memperoleh sumber data untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara kepada penyidik di Polres Klaten, pelaku serta tokoh masyarakat yang terkait dengan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dilihat dari perspektif hukum dan ham.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang terkait dengan persoalan yang diteliti yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta berbagai buku dan literatur.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang berkaitan dengan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum dan Ham.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan mempelajari serta mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi yang menjadi obyek dalam penelitian serta melakukan studi lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait di Polres Klaten yang selanjutnya akan dikaji serta dipelajari secara utuh.

6. Metode analisis data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analisis, yaitu apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil Penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang *eigenrichting* dalam KUHP dan Undang-Undang HAM, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai faktor penyebab terjadinya tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana, serta upaya penanggulangan tindakan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

BAB IV adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, hal. 192.